

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Alasan saya tertarik untuk menulis tema tentang “Upaya Serbia Dalam Mendapatkan Status Keanggotaan di Uni Eropa Tahun 2009-2013” dikarenakan isu perluasan keanggotaan menjadi isu yang harus dihadapi oleh Uni Eropa di masa kontemporer. Proses perluasan keanggotaan tersebut sebenarnya sudah dilakukan sejak Uni Eropa masih bernama Komunitas Eropa atau *European Community*.

Keberhasilan Uni Eropa dalam berbagai bidang seperti ekonomi dan politik, menjadi salah satu alasan mengapa banyak negara-negara calon anggota yang mengajukan diri dan ingin bergabung ke dalam Uni Eropa. Selain itu, Uni Eropa yang telah mempertimbangkan untuk memperluas keanggotaannya di daerah Balkan mendapat dukungan positif dari negara-negara calon anggota di daerah tersebut. Hal ini pun dikarenakan, bagi negara calon anggota baru mendapatkan predikat sebagai anggota Uni Eropa diharapkan dapat membawa kesejahteraan bagi negaranya tersebut. Salah satu negara di daerah Balkan yang menjadi calon anggota Uni Eropa yaitu Serbia.

Menurut beberapa sumber elektronik yang saya baca, dalam proses mendapatkan status keanggotaan di Uni Eropa, Serbia mendapatkan beberapa hambatan yang membuat Serbia harus berupaya lebih keras lagi. Salah satu hambatan tersebut yaitu negara anggota tetap Uni Eropa yakni Inggris dan Belanda, keberatan dengan pengajuan diri pemerintah Serbia tersebut terkait kejahatannya di masa lalu. Dari hambatan-hambatan yang didapat oleh Pemerintah Serbia itulah, maka saya tertarik untuk membahas upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Serbia dalam skripsi saya kali ini.

B. Latar Belakang Masalah

Serbia atau nama resminya Republik Serbia merupakan sebuah negara berdaulat yang terletak di persimpangan Eropa Tengah dan Tenggara, yang meliputi bagian selatan Dataran Pannonian dan Balkan pusat. Sejarah dan prestasinya menjadikan Serbia bagian integral dari peradaban modern dan masyarakat internasional.¹ Serbia berbatasan dengan Hongaria di sebelah utara, kemudian Rumania dan Bulgaria di sebelah timur, Makedonia di sebelah selatan, serta Kroasia, Bosnia dan Herzegovina, Montenegro di sebelah barat daya.

Serbia merupakan salah satu negara calon anggota Uni Eropa. Hal ini terjadi setelah pengumuman resmi Uni Eropa di tahun 2003 di mana negara-negara Balkan merupakan negara-negara kandidat yang memiliki potensi untuk masuk dalam keanggotaan Uni Eropa. Banyak negara-negara di sekitar Uni Eropa yang mengajukan diri untuk dapat bergabung dengan Uni Eropa. Adapun negara-negara yang menjadi kandidat anggota Uni Eropa adalah Albania, Eslandia, Republik Makedonia bekas Yugoslavia, Montenegro, Serbia dan Turki. Negara-negara tersebut menyadari bahwasannya keanggotaan mereka dalam masyarakat Eropa merupakan kunci utama untuk dapat bergabung kembali dan bekerjasama dengan anggota-anggota Uni Eropa.

Uni Eropa sendiri merupakan suatu organisasi antar-pemerintah dan supra-nasional. Uni Eropa merupakan kelompok yang terdiri dari 28 negara independen yang unik.² Pada awal berdirinya Uni Eropa hanya beranggotakan enam negara, yaitu Belgia, Jerman, Perancis, Italia, Luksemburg, dan Belanda.³ Uni

¹ *Basic Fact*. (n.d.). Retrieved Februari 22, 2017, from Serbian Government: <http://www.srbija.gov.rs/pages/intro.php?id=5>

² *Sekilas Uni Eropa (pdf)*. (2015). Diakses Februari 17, 2017, from http://eeas.europa.eu/archives/delegations/indonesia/documents/more_info/pub_2015_euataglace_id.pdf

³ *The EU in brief*. (n.d.). Diakses Oktober 2, 2016, from European Union: https://europa.eu/european-union/about-eu/eu-in-brief_en

Eropa sendiri dibentuk untuk menciptakan kemitraan ekonomi yang kuat. Selain itu Uni Eropa juga memberi jaminan perdamaian dan stabilitas di antara negara-negara anggotanya⁴ untuk mengurangi kemungkinan terjadinya konflik di kawasan Uni Eropa itu sendiri. Untuk mewujudkan kedua hal tersebut, pada 1 Januari 1958 Uni Eropa pun membentuk Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE) yang bergerak dalam penyatuan ekonomi.

Sejak saat itu, Masyarakat Ekonomi Eropa mulai berkembang pesat dan menjadi pasar tunggal yang besar. Sehingga pada tahun 1993, mereka merubah nama menjadi Uni Eropa. Seiring berjalannya waktu Uni Eropa yang awalnya hanya berfokus pada penyatuan ekonomi pun memperluas gerakannya ke segala bidang kehidupan negara anggotanya. Uni Eropa sendiri mempunyai cita-cita yaitu untuk menyatukan kembali benua Eropa ke dalam satu kesatuan untuk mengkonsolidasikan perdamaian dan demokrasi bagi kemajuan dan kesejahteraan yang dihasilkan oleh integrasi Eropa.⁵ Hingga saat ini negara-negara yang tergabung dalam Uni Eropa adalah Austria, Belgia, Bulgaria, Siprus Yunani, Ceko, Denmark, Estonia, Finlandia, Perancis, Jerman, Yunani, Hungaria, Irlandia, Italia, Latvia, Lituania, Luksemburg, Malta, Belanda, Polandia, Portugal, Rumania, Slovakia, Slovenia, Spanyol, Swedia, Inggris, dan Kroasia.

Seiring berjalannya waktu Uni Eropa pun memiliki ambisi untuk menambah kekuasaannya dengan cara melakukan perluasan keanggotaan. Perluasan tersebut akan dilakukan ke negara-negara Eropa Timur, Eropa Tengah dan negara-negara Balkan. Hal ini dapat terlihat sejak akhir 1990an, dimana Uni Eropa telah mempertimbangkan untuk memperluas kekuasaannya di daerah Balkan. Bahkan di tahun 2003, Uni Eropa secara resmi menyatakan bahwa negara-negara Balkan merupakan negara-negara kandidat yang berpotensi untuk masuk dalam keanggotaan Uni Eropa. Adapun kriteria-kriteria untuk masuk menjadi kandidat keanggotaan Uni Eropa ini ditetapkan pada pertemuan Dewan Uni Eropa Juni 1993 di Kopenhagen, Denmark. Kutipan dari pertemuan tersebut adalah⁶

“Untuk menjadi anggota, negara kandidat disyaratkan untuk memperoleh stabilitas institusi yang menjamin demokrasi, aturan hukum, hak asasi manusia, penghormatan dan perlindungan kaum minoritas, keberadaan ekonomi pasar yang berfungsi dan kemampuan untuk menghadapi tekanan kompetitif dan kekuatan pasar di Uni Eropa. Negara kandidat disyaratkan memiliki kemampuan mematuhi kewajiban keanggotaan termasuk patuh dengan tujuan politik, ekonomi dan moneter Uni Eropa”

Dari kutipan diatas dapat disimpulkan, bahwasannya syarat untuk dapat menjadi anggota Uni Eropa sebenarnya sangat mudah. Sesuai Kriteria Kopenhagen (*Copenhagen Criteria*), hanya ada tiga syarat yang diajukan. Pertama, calon anggota (negara) Uni Eropa harus memiliki demokratis yang stabil, serta dapat menjamin supremasi hukum, hak asasi manusia (HAM) dan perlindungan kaum minoritas. Kedua, menerapkan konsep pasar bebas, yang mana dalam hal ini ekonomi pasar yang berfungsi serta administrasi publik yang dapat menerapkan dan mengelola undang-undang Uni Eropa. Serta, ketiga mampu serta bersedia menerapkan semua hukum yang ada di Uni Eropa.

Namun, pada kenyataannya perluasan keanggotaan tersebut membawa keuntungan dan dilemma bagi Uni Eropa. Di satu sisi, keinginan negara-negara calon anggota bergabung dengan Uni Eropa menjadi salah satu bukti keberhasilan Uni Eropa menjadi sebuah institusi supra-nasional. Tingginya keinginan negara-negara baru untuk bergabung dengan Uni Eropa, dapat diartikan bahwa Uni Eropa telah dipercaya menjadi sebuah regionalisme yang *settled* di kawasan Eropa. Di sisi lain, penambahan anggota juga

⁴ Ciptowiyono, I. (2015, Juni 24). *Mengapa Serbia Masih Belum Diterima di Uni Eropa?*. Diakses Februari 17, 2017, from Kompasiana: http://www.kompasiana.com/isharyanto/mengapa-serbia-masih-belum-diterima-di-uni-eropa_552bcee96ea83465248b457f

⁵ *Ibid.*

⁶ *Presidency Conclusions Copenhagen European Council - 21-22 June 1993 (pdf)*. (n.d.). Diakses Oktober 4, 2016, from European Union: http://www.europarl.europa.eu/enlargement/ec/pdf/cop_en.pdf

memberikan dampak negative yang mana secara logis akan mempengaruhi proses *governance* di Uni Eropa. Selain itu pula negara-negara baru tersebut harus menyesuaikan diri dengan institusi-institusi yang ada di Uni Eropa. Karena jika negara-negara baru tersebut tidak berhasil menyesuaikan diri dengan prosedur kebijakan (*rules of procedure*) yang berlaku, akan mengganggu stabilitas Uni Eropa itu sendiri.

Keberhasilan Uni Eropa dalam meningkatkan pertumbuhan dan stabilitas politik di negara-negara Uni Eropa serta adanya *Treaty of Amsterdam* pada 17 Juni 1997, telah membuka kesempatan dan mendorong keinginan negara-negara non anggota, termasuk Serbia untuk melamar dan bergabung menjadi anggota Uni Eropa.⁷ Selain itu, runtuhnya komunisme menggusur batas-batas ideologis dan negara-negara baru di Eropa Timur dan Eropa Tengah, termasuk Serbia yang menjadikan alasan tersebut untuk dapat masuk menjadi anggota Uni Eropa. Alasan lain Serbia ingin menjadi anggota Uni Eropa adalah beberapa kepentingan Serbia di beberapa bidang yang dapat terpenuhi. Kepentingan tersebut yaitu ada pada bidang ekonomi dan politik.

Di dalam bidang ekonomi, beberapa kepentingan yang dapat terpenuhi yaitu berupa peningkatan volume ekspor atau perluasan perdagangan dan peningkatan arus investasi asing ke Serbia. Hal ini pun diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Serbia secara umum. Kemudian, di dalam bidang politik salah satu kepentingan yang dapat terpenuhi adalah keanggotaan Serbia dalam Uni Eropa dapat memperkuat proses konsolidasi demokrasi, stabilitas politik domestik serta memperkuat posisi internasional Serbia. Sehingga hal tersebut dapat menata kembali hubungan bilateral Serbia dengan negara tetangga yang nantinya akan dapat meningkatkan hubungan kerjasama dengan negara lain.

Pada 22 Desember 2009, usaha Serbia untuk berintegrasi dengan Uni Eropa sudah memasuki proses dimana Pemerintah Serbia telah mengajukan permohonan keanggotaan Uni Eropa. Hal ini dikarenakan hubungan baik antara Serbia dengan Uni Eropa yang telah terjalin cukup lama. Selain itu menurut Presiden Serbia, Boris Tadic, mempunyai harapan tinggi dari keanggotaan Uni Eropa:

“Melalui integrasi di Uni Eropa kita dapat menciptakan lingkup politik luar negeri yang baru, dimana Serbia akan menjadi tempat penanaman yang luar biasa. Juga akan diciptakan lapangan kerja baru, yang merupakan persyaratan bagi perkembangan.”⁸

Namun, perjuangan Serbia untuk mendapatkan status tersebut tidaklah mudah. Hal ini dikarenakan masih terdapat masalah dalam wilayah domestik Serbia itu sendiri. Salah satu hambatan yaitu pada bidang politik, mengenai kedaulatan Kosovo, dimana beberapa anggota Uni Eropa seperti Spanyol, Yunani, Cyprus, Slowakia dan Rumania menolak terhadap pengakuan Kosovo sebagai negara berdaulat. Selain itu beberapa negara anggota Uni Eropa mempunyai posisi yang sama dengan Serbia, di mana proklamasi kemerdekaan negara muda Kosovo merupakan sebuah aksi pemisahan yang ilegal. Spanyol dan Cyprus khawatir, Kosovo dapat digunakan sebagai contoh oleh gerakan separatistis di negara-negara itu sendiri.

Selain itu, masih terdapat masalah mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) mengenai kejahatan perang yang terjadi di masa lalu oleh Ratko Mladic yang menjadi hambatan Serbia mendapatkan status keanggotaan di Uni Eropa. Hal ini pun membuat Inggris dan Belanda secara keras menolak untuk meratifikasi kesepakatan asosiasi dan stabilisasi dengan Serbia, selama mantan jendral Bosnia, Ratko Mladic, ini belum dikirim ke mahkamah kejahatan perang internasional di Den Haag. Selain hambatan-hambatan tersebut, panjangnya proses integrasi Serbia dalam mendapatkan status keanggotaan penuh di Uni Eropa. Selama proses tersebut Uni Eropa sering kali mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang menuntut upaya Serbia untuk memenuhi berbagai prasyarat keanggotaan penuh Uni Eropa.

⁷ Ciptowiyono, I. (2015, Juni 24). *Op. cit.*

⁸ Schmidt, F. (2009, Desember 23). *Serbia Melamar Menjadi Anggota Uni Eropa*. Diakses Februari 17, 2017, from <http://www.dw.com/id/serbia-melamar-menjadi-anggota-uni-eropa/a-5050783>

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan di atas, maka penulis menarik sebuah rumusan masalah, yaitu;

“Bagaimana upaya Serbia dalam mendapatkan status keanggotaan di Uni Eropa tahun 2009-2013?”

D. Kerangka Pemikiran

Untuk membahas lebih jauh lagi mengenai rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dalam hal ini penulis perlu mendeskripsikan jawaban dengan menggunakan teori atau pun konsep sebagai kerangka dasar berfikir yang dapat membantu serta mendukung penulis dalam melakukan penelitian. Teori dan konsep juga dapat dijadikan sebagai sarana eksplanasi dan juga menjadi dasar prediksi. Maka dalam hal ini, penulis menggunakan Konsep Integrasi dan Konsep Diplomasi sebagai dasar analisa yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas dan tepat. Pemaparan dari kerangka pemikiran adalah sebagai berikut;

1. Konsep Integrasi

Integrasi adalah proses yang mengarah pada kondisi untuk membangun komunitas politik baru dan institusi supranasional atau intergovernmental dengan menyerahkan sebagian kekuasaan negara. Integrasi menurut model fungsional adalah suatu proses uji coba terus menerus berdasarkan satu keberhasilan ke keberhasilan berikutnya.⁹ Aliran fungsionalis berpendapat bahwa diantara beberapa masyarakat yang paling serasi sekalipun, tidak dapat mengintegrasikan semua fungsi umum secara bersamaan kolektifitas harus dilakukan persektor ekonomi, politik dan keamanan yang mana kemajuan secara bertahap disejumlah sektor tersebut akan menyatu kedalam sebuah integrasi antar sektoral secara keseluruhan. Tanpa penyatuan tersebut, integrasi akan terbatas dan terisolasi, serta tidak memiliki pengaruh terhadap sektor sektor lainnya.

Salah satu definisi integrasi yang paling berpengaruh adalah menurut Karl Deutsch. Ia mengartikan konsep integrasi dengan “*security community*”, dimana penciptaan lembaga-lembaga dan praktek-praktek yang cukup kuat dan cukup meluas sehingga bisa menjamin harapan diantara penduduknya akan suatu perubahan secara damai untuk waktu yang lama. Menurut Deutsch, “*security community*” atau komunitas keamanan adalah:

“suatu komunitas politik, memang tidak mesti mampu mencegah terjadinya perang di wilayahnya.... Tetapi, beberapa komunitas politik betul-betul mampu menghapuskan peran dan harapan akan terjadinya perang di dalam wilayahnya itu.... karena itu, komunitas keamanan (*security community*) adalah suatu komunitas politik yang didalamnya terdapat, jaminan nyata bahwa anggota-anggota komunitas itu tidak akan saling berperang, dan tidak akan melukai satu sama lain melalui kekuatan yang mereka miliki, tetapi para anggota dalam komunitas tersebut akan menyelesaikan sengketa dengan cara lain sebagai gantinya.”¹⁰

Dalam bukunya *Political Community and North Atlantic Area*,¹¹ Deutsch menunjukkan bahwasannya setiap komunitas selalu memerlukan dua prasyarat: pertama adalah konsistensi nilai-nilai utama mereka (termasuk ide-ide politik seperti konstitusionalisme dan demokrasi dan konsep ekonom liberal); dan yang kedua adalah reaktivitas umum (seperti simpati dan komitmen bersama, keyakinan umum dan pertimbangan, identitas parsial; citra diri dan minat, kemampuan untuk memprediksi

⁹ Walter S. Jones. *Logika Hubungan Internasional*. Hlmn. 429

¹⁰ Deutsch, K. W. (1957). *Political Community and North Atlantic Area*. (B. F. Alexander, Ed.) Lynniere Enner Publisher.

¹¹ *Ibid.*

tindakan masing-masing dan melakukan aktivitas yang sejalan). Khususnya, ketersediaan komunitas umum dan adanya transaksi antar anggota merupakan ukuran yang dapat diandalkan untuk mewujudkan komunitas keamanan.

Dengan kata lain, “komunitas keamanan” adalah asosiasi di mana kepentingan antara negara anggota untuk bekerjasama telah mencapai keutamaan yang disebabkan adanya kecenderungan akan adanya konflik. Komunitas tersebut ditandai dengan (i) tingkat kepercayaan yang tinggi, (ii) aspirasi umum, (iii) probabilitas rendah dalam terjadinya konflik bersenjata, dan (iv) perbedaan yang jelas antara kehidupan di dalam dan di luar komunitas. Singkatnya, komunitas keamanan yang dianjurkan oleh Deutsch dan pendukungnya didasarkan pada kepentingan bersama jangka panjang, yaitu negara menghindari perang.

Selain Deutsch, yang mendefinisikan mengenai konsep integrasi adalah Ernst Haas. Menurut Haas konsep integrasi adalah;

“proses dengan mana actor-aktor politik di beberapa wilayah nasional yang berbeda terdorong untuk memindahkan kesetiaan, harapan, dan kegiatan politik mereka ke suatu pusat baru yang lembaga-lembaganya memiliki atau menuntut yuridiksi atas negara-negara nasional yang sudah ada sebelumnya.”¹²

Integrasi merupakan proses yang disadari oleh setiap negara dan pemerintahan yang pasti memiliki tujuan yang jelas. Ada beberapa motivasi yang menjadi tujuan utama dalam proses integrasi yaitu; pertama, potensi politik dimana negara negara kecil yang tidak memiliki kekuasaan politik, selalu tersisih dalam sistem internasional. Negara negara kecil tersebut selalu menjadi korban negara super power. Bagian dari negara negara kecil tersebut berpaling ke integrasi sebagai cara untuk menghidupkan kembali multipolaritas yang memungkinkan diplomasi mereka lebih berperan.

Kedua, potensi ekonomi, yang mana beberapa perekonomian raksasa tidak memungkinkan bagi negara negara kecil untuk bersaing, baik itu negara berkembang maupun negara industri yang melakukan integrasi karena ingin memiliki daya saing yang lebih baik. Ketiga, Resolusi konflik merupakan motivasi dalam proses integrasi yang merupakan dorongan lain menuju integrasi seperti keinginan untuk meredam setiap potensi konflik yang terjadi antar negara yang saling bertetangga. Pengintegrasian sektor sektor tersebut secara vital akan menumbuhkan rasa saling ketergantungan sehingga dapat mematikan bibit-bibit dari potensi konflik yang ada.

Selain tujuan yang memotifasi terjadinya integrasi terdapat beberapa kondisi yang menjadi pendorong terjadinya integrasi yaitu; Asimilasi sosial, yang merupakan prakondisi integrasi regional terpenting seperti kondisi sosial. Kesamaan nilai, yang merupakan adanya kesamaan nilai diantara kaum elit. Keuntungan bersama, dimana setiap negara yang bersedia masuk kedalam suatu proses yang secara fundamental dapat mengubah hak istimewa nasionalnya, jika hal tersebut memberikan keuntungan. Kedekatan hubungan dimasa lampau seperti kesamaan pengalaman dalam sejarah tingkat kedekatan hubungan anatar suatu bangsa, dimana bangsa tersebut tidak akan berintegrasi dengan bangsa lainnya yang asing baginya.

Pentingnya integrasi itu sendiri menjadi manfaat yang mana tanpa kedekatan kepentingan maka proses integrasi tidak akan terjadi. Apabila suatu negara merasakan pentingnya aktivitas di negara lain maka dorongan arah integrasi akan tumbuh. Biaya relatif rendah merupakan jaminan bahwa keuntungan integrasi lebih banyak dari pada pengeluarannya baik secara ekonomi, sosial maupun kepentingan negara atau pemerintah.¹³ Pengaruh pengaruh eksternal dibagi menjadi dua faktor yang dapat

¹² Haas, E. (1990). Dikutip dalam Joseph Nye, Peace in Parts. In M. Mas'oeed, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: LP3ES. Hal 153.

¹³ Sandler, Todd and Cauley, Jon. (1977). *The Design of Supranational Structures: An Economic Prespective*.

mempengaruhi proses integrasi yaitu ; pertama, peristiwa eksternal yang menyangkut kepentingan salah satu negara anggota integrasi. Peristiwa tersebut dapat mengganggu partisipasi dari negara tersebut ataupun sebaliknya dapat mendorong negara tersebut lebih berpaling ke kawasannya sendiri. Kedua, peristiwa eksternal tidak berpusat hanya pada negara anggota saja tetapi juga mampu mempengaruhi proses integrasi. Kebijakan luar negeri suatu negara dapat mempengaruhi satu atau lebih negara anggota integrasi. Pengaruh tersebut bisa bersifat integratif atau disintegratif.

Krisis finansial global yang terjadi pada tahun 2007-2008 telah menyeret dampak ke semua negara, tak terkecuali Serbia meskipun pada skala yang berbeda-beda. Krisis tersebut membuat pertumbuhan ekonomi Serbia melambat. Bahkan reformasi struktural yang tertunda sejak krisis tersebut membuat jumlah pengangguran menjadi tinggi, dan pendapatan negara stagnan. Selain itu, tingginya tingkat korupsi, populasi yang menua, dan sistem peradilan yang tidak efisien menjadi tantangan jangka panjang bagi Serbia. Hal ini pun menjadi alasan Serbia mengajukan dirinya sebagai calon kandidat anggota Uni Eropa.

Bagi Serbia, integrasi yang dilakukan ke Uni Eropa merupakan proses yang disadari, dimana Pemerintah Serbia memiliki motivasi-motivasi yang menjadi tujuan utama dalam proses tersebut. Masuknya Serbia kedalam integrasi Uni Eropa, secara ekonomi akan membuka peluang datangnya investasi asing terutama dari anggota-anggota Uni Eropa dalam skala besar yang akan memicu pertumbuhan ekonomi di negara Serbia itu sendiri. Kepentingan integrasi inilah yang menjadi upaya Serbia untuk mendapatkan status keanggotaannya di Uni Eropa. Sehingga pada 1 Januari 2009, pemerintah Serbia mengimplementasikan Perjanjian Perdagangan Sementara dengan Uni Eropa.¹⁴ Bahkan, Komisi Eropa memutuskan untuk menempatkan Serbia dalam daftar perjanjian Schengen, tanggal 30 November 2009. Kemudian diikuti pada tanggal 7 Desember 2009, Komisi Eropa memutuskan untuk menerapkan kesepakatan Perdagangan Intern dengan Serbia.

2. Konsep Diplomasi

Diplomasi secara teori yaitu praktek pelaksanaan hubungan antar negara melalui perwakilan resmi. Diplomasi merupakan teknik operasional untuk mencapai kepentingan nasional diluar wilayah yurisdiksi sebuah negara.¹⁵ Setiap negara memiliki kepentingan nasional yang harus dicapai dengan tujuan supaya masyarakatnya dapat hidup dengan tentram dan aman. Untuk memenuhi kepentingan nasional tersebut suatu negara perlu mengadakan kerjasama dengan negara lain dan begitu pun sebaliknya. Untuk melindungi kepentingan nasional pun suatu negara harus berselisih paham dengan negara lainnya. Oleh karena hal tersebut, maka diplomasi menjadi sebuah hal yang perlu dilakukan oleh suatu negara agar kerjasama dapat dilakukan dengan negara lain dan konflik yang terjadi dapat diatasi. Diplomasi menjadi sebuah cara mencapai politik luar negeri sehingga kepentingan nasional dapat dipenuhi.

Secara sederhana, politik luar negeri dapat dipahami sebagai kebijakan yang diterapkan suatu negara dalam menjalin hubungan dengan negara lain dikancah internasional. Pada dasarnya politik luarnegerimerupakan perpanjangan tangan dari politik dalam negeri dan refleksi cita-cita yang ingin dicapai oleh negara. Politik luar negeri juga dapat dipahami sebagai rencana komprehensif yang dibuat dengan baik, didasarkan pada pengetahuan dan pengalaman, untuk menjelaskan bisnis pemerintahan

International Studies Quartely, (vol.21). Hlmn. 251-276.

¹⁴ *Mengapa Serbia Masih Belum Diterima di Uni Eropa?* (2015, Juni 24). Diakses Februari 22, 2017, from http://www.kompasiana.com/isharyanto/mengapa-serbia-masih-belum-diterima-di-uni-eropa_552bcee96ea83465248b457f

¹⁵ Plano, R. O. dan Jack C. (1999). *Internasional Relations Dictionary*. (Vol. 2). (W. Juanda, Trans.) Jakarta: Putra A. Bardhin CV. Hlmn. 201

dengan negara lain. Politik luar negeri ditunjukkan pada peningkatan dan perlindungan kepentingan bangsa. Politik luar negeri ini seiring dengan kepentingan nasional adalah hal yang harus dicapai sehingga diplomasi dibutuhkan agar politik luar negeri dapat dicapai dan kepentingan nasional terpenuhi dan diplomasi menjadi sebuah alat untuk mencapai tujuan tersebut.

Beberapa definisi mengenai diplomasi yakni dalam Oxford English Dictionary menyebutkan “*The management of international relations by negotiations. The methods by which these relations are adjusted and managed.*” Kemudian, menurut Sir Earnest Satow dalam bukunya *Guide to Diplomacy Practice* mengatakan diplomasi adalah “*The application of intelligence and tact to conduct of official relations between the government of independent states.*”

Diplomasi merupakan instrument penting dalam mengimplementasikan kebijakan politik luar negeri untuk mencapai kepentingan nasional. Diplomasi dalam banyak hal sering dikaitkan dengan hubungan antar negara yang memberikan suatu peranan yang besar dalam pemeliharaan perdamaian dengan mengedepankan seni negosiasi. Kautilya menekankan empat tujuan utama diplomasi yaitu *Acquisition* (perolehan), *Preservation* (pemeliharaan), *Augmentation* (penambahan), dan *Proper Distribution* (pembagian yang adil)¹⁶. Dalam pelaksanaan diplomasi, ada beberapa sarana yang sangat menentukan dalam keberlangsungan diplomasi tersebut yaitu bujukan (*persuasion*), kerja sama (*compromise*), dan ancaman kekerasan (*threat of force*). Dalam hal ini ancaman kekerasan atau perang merupakan tindakan terakhir dari diplomasi apabila diplomasi gagal dalam mencapai tujuannya dengan cara damai.

Dari pemaparan diatas terdapat lima poin penting dari diplomasi yaitu :

1. Unsur pokok diplomasi adalah negosiasi
2. Negosiasi yang dilakukan itu untuk kepentingan negara yang bersangkutan
3. Diplomasi dilakukan untuk kepentingan nasional yang dilaksanakan dengan cara damai
4. Diplomasi berkaitan dengan politik luar negeri suatu negara
5. Perwakilan negara merupakan suatu bagian dari diplomasi.

Jadi diplomasi dapat diartikan sebagai seni suatu negara untuk berhubungan dengan negara lain yang mana untuk memenuhi kepentingan negara itu sendiri.

Permasalahan dalam wilayah domestik Serbia pada perkembangannya selalu mengalami pasang surut. Seperti salah satu hambatan dalam bidang politik, dimana hambatan dari perjalanan Serbia menuju keanggotaan Uni Eropa adalah masalah Kosovo, dimana anggota-anggota Uni Eropa sendiri ada ketidaksepakatan mengenai masalah ini. Sebanyak 22 anggota Uni Eropa mengakui Kosovo sebagai negara berdaulat, namun Spanyol, Yunani, Cyprus, Slowakia dan Rumania menolak terhadap pengakuan tersebut. Penolakan terhadap pengakuan Kosovo sebagai negara berdaulat oleh beberapa negara anggota Uni Eropa mempunyai posisi yang sama dengan Serbia, bahwasannya proklamasi kemerdekaan negara muda Kosovo merupakan sebuah aksi pemisahan yang ilegal. Spanyol dan Cyprus khawatir, Kosovo dapat digunakan sebagai contoh oleh gerakan separatis di negara-negara itu sendiri.

Selain masalah ini, masyarakat Serbia juga masih mempunyai permasalahan lain, yang juga tidak diinginkan Uni Eropa. Seperti masalah perbatasan, kewarganegaraan ganda atau masalah pengungsi. Kemudian, masalah mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) yaitu mengenai kejahatan perang yang terjadi di masa lalu oleh Ratko Mladic. Kejahatan perang tersebut telah merusak nama baik Serbia di mata negara-negara Internasional. Hal ini pun membuat Inggris dan Belanda secara keras menolak untuk meratifikasi kesepakatan asosiasi dan stabilisasi dengan Serbia, selama mantan jendral Bosnia ini belum dikirim ke mahkamah kejahatan perang internasional di Den Haag. Mladic bertanggung jawab atas pembunuhan massal di Srebrenica tahun 1995.

¹⁶ S.L. Roy. (1995). *Diplomacy*. (Harwanto, Mirsawati. trans.). Jakarta. Hlmn. 6

Terlepas dari jalur diplomasi yang dilakukan oleh Serbia lebih digunakan untuk menjaga hubungan baik dengan negara-negara di Uni Eropa. Upaya yang dilakukan oleh Serbia untuk mendapatkan status keanggotaan di Uni Eropa dilakukan langkah demi selangkah ke sektor per sektor. Meskipun hingga saat ini Serbia belum mendapatkan status keanggotaan tersebut, namun beberapa kerjasama antara Serbia dengan beberapa negara anggota Uni Eropa sudah dilakukan dalam beberapa sektor. Seperti Pemerintah Serbia menegaskan kembali kerjasamanya dengan ICTY. Hal ini terjadi setelah sebelumnya pada tanggal 3 Mei 2006 negosiasi perjanjian Stabilisasi dan Asosiasi tersebut dibatalkan karena kurangnya kemajuan kerjasama antara pemerintah Serbia dengan *International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia* (ICTY) terkait penangkapan para penjahat perang.¹⁷ Kemudian, pada tanggal 29 April 2008 Perjanjian Stabilisasi dan Asosiasi (SAA) serta Perjanjian Sementara Perdagangan dan isu-isu terkait antara Serbia dan Uni Eropa ditandatangani di Luxembourg, serta diratifikasi oleh Majelis Nasional Serbia.

D. Hipotesa

Serbia berupaya untuk bergabung dengan Uni Eropa dengan memenuhi syarat-syarat keanggotaan Uni Eropa; yakni melakukan perubahan dalam bidang ekonomi untuk dapat bersaing dengan pasar bebas di Uni Eropa; dalam bidang politik memperkuat demokrasi Serbia; dan bidang hukum seperti bekerjasama dengan *International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia* (ICTY) untuk menangkap penjahat perang di masa lalu, yang mana hal tersebut untuk memenuhi kriteria Kopenhagen.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan proposal skripsi ini untuk:

1. Menerapkan ilmu dan teori yang telah di dapat selama di bangku perkuliahan, dengan menggunakan metodologi yang sesuai dengan ranah ilmu hubungan internasional.
2. Menganalisa terkait diplomasi yang digunakan oleh suatu negara terhadap organisasi internasional dengan sudut pandang yang berbeda.
3. Untuk memperluas dan memperdalam pengetahuan penulis yang berkaitan dengan politik luar negeri suatu Negara dengan organisasi internasional serta kepentingan suatu Negara dengan organisasi internasional.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang akan digunakan pada penelitian ini adalah tipe eksplanatif, yaitu untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Sehingga, penelitian ini kemudian diharapkan bisa memberikan gambaran mengenai upaya Serbia terhadap status keanggotaan di Uni Eropa 2009 - 2013.

2. Jenis Data dan Sumber Data

Jenis Data yang akan dilakukan dalam metode penelitian ini adalah deskriptif dengan sumber data dalam penelitian ini akan menggunakan data sekunder. Data sekunder didapat dari literature, jurnal, artikel, serta situs internet yang berkenaan dengan upaya Serbia terhadap status keanggotaan di Uni Eropa 2009 - 2013.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan

¹⁷ *Mengapa Serbia Masih Belum Diterima di Uni Eropa?* (2015, Juni 24). *Op. cit.*

analisis muatan/ isi (*content analysis*) yang memuat data-data yang relevan.

4. Analisis Data

Analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menyimpulkan teknik analisis data kuantitatif. Penulis akan menyimpulkan dan memberikan jawaban atas fenomena di lapangan dari data-data yang diperoleh ke dalam bentuk yang lebih sederhana.

G. Jangkauan Penelitian

Pada penelitian ini, penulis akan membatasi pembahasan penelitian pada jangkauan upaya Serbia terhadap status keanggotaan di Uni Eropa yang difokuskan pada tahun 2009 - 2013. Dalam penelitian ini, penulis akan menjelaskan dan menguraikan bagaimana proses diplomasi yang dilakukan oleh Serbia terhadap status keanggotaannya di Uni Eropa. Selain itu juga penulis akan membahas alasan apa yang mendasari dari keinginan Serbia untuk mendapat status keanggotaannya di Uni Eropa.

H. Sistematika Penulisan

Dalam proposal skripsi ini, penulis akan membagi sistematika penulisan skripsi dalam 5 (lima) Bab, yaitu;

Pada Bab I, penulis mengisi bagian pendahuluan dengan memuat latar belakang masalah yang dilanjutkan ke dalam rumusan masalah. Bab ini juga dilengkapi dengan kerangka dasar pemikiran yang akan dipakai yang dan disimpulkan ke dalam hipotesa. Di dalam Bab ini juga terdapat tujuan penulisan, metode pengumpulan data, jangkauan penelitian, serta sistematika penulisan.

Pada Bab II, penulis akan memaparkan bagaimana dinamika hubungan bilateral Serbia – Uni Eropa sebelum mengajukan diri menjadi kandidat anggota Uni Eropa.

Pada Bab III, penulis akan membahas mengenai proses-proses yang dilakukan Serbia menuju keanggotaan di Uni Eropa sampai Serbia mendapatkan status keanggotaan sebagai kandidat potensial di Uni Eropa beserta respon-respon yang Serbia dapatkan baik dari internal negara Serbia (masyarakat) maupun dari eksternal Serbia seperti dari negara-negara Uni Eropa.

Pada Bab IV, penulis akan membahas mengenai berbagai upaya transformasi yang dilakukan oleh pemerintah Serbia baik dalam bidang ekonomi, bidang politik, maupun bidang hukum mengenai kerjasama pemerintah Serbia dengan tim penyelidik pengadilan kejahatan perang PBB untuk bekas Yugoslavia (*ICYT-International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia*) dalam penangkapan para penjahat perang yang terlibat dalam konflik Srebrenica sebagai syarat untuk memenuhi kriteria kopenhagen serta membahas

Pada Bab V, penulis menutup dengan kesimpulan sehingga hipotesis dapat dibuktikan.